

Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Posyandu Di Desa Lawang Agung Kabupaten Bengkulu Selatan

Endah Sanora ¹, Evi Lorita ², Harius Eko Saputra ³

Article history:

Received: 2024-05-23, Accepted: 2024-06-28, Published: 2024-06-30

This research aims to find out evaluation of policy on Posyandu organization in Lawang Agung Village, South Bengkulu Regency. Data collection techniques are carried out by means of interviews, observation, and documentation. After the research results were obtained, they were analyzed by collecting data, reducing data, presenting data and drawing conclusions. The informants in this study is 7 people consisting of 3 key informants and 4 main informants. The theory used in this research according to Wayne Parsons (2008: 549-552), there are two types of policy evaluation models used, namely Formative Evaluation and Summative Evaluation. Based on the research results, conclusions can be drawn, namely: 1. Formative Evaluation a. The integration of posyandu program in Lawang Agung village follows the guidelines of the Minister of Home Affairs Regulation No. 19 of 2011. b. Posyandu services are carried out with 5-table system in accordance with the provisions (DEPKES RI 2006), where tables 1-IV are the duties of cadres. While table V is a professional such as Doctors, Midwives, Nutrition Team, Kesling & Kespro and Nurses. d. The resources needed are human resources, facilities and infrastructure, additional food and budget funds, where the health fund budget is taken from 10% of APBD and ADD funds. 2. Summative Evaluation, a. Comparison of public health before and after the posyandu program is implemented, the comparison can be seen from the postnatal maternal mortality rate (MMR), infant mortality rate (IMR), as well as an increase in the community's healthy and clean lifestyle. b. The impact of the intervention on one main group or group that is not a control, no adverse effects have been found so far, there is only cooperation from the village government, Health Center and Health Office. c. Comparing what happened with what might have happened without intervention, the cooperation carried out is part of the functions and duties of the obligations of the village head. d. Regional division policy is based on the functions and duties of the village head. Regional division policy is based on population and village area so that the aim is to facilitate program implementation.

Keywords: Policy Evaluation, Posyandu Organization.

¹ Universitas Dehasen Bengkulu / endahsanora20@gmail.com

² Universitas Dehasen Bengkulu

³ Universitas Dehasen Bengkulu

Pendahuluan

Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar, utamanya untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak melalui pelayanan kesehatan primer yang terintegrasi dengan masyarakat.

Dalam melaksanakan pembangunan kesehatan diperlukan sebuah kebijakan yang mana kebijakan itu digunakan sebagai landasan dalam menjalankan sistem pemerintahan. Berdasarkan kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar Di Pos Pelayanan Terpadu. Maka dijelaskan bahwa Kebijakan posyandu adalah kerangka kerja yang mengatur implementasi dan pengembangan program posyandu. Kebijakan ini meliputi berbagai aspek, seperti strategi pelaksanaan, peran dan tanggung jawab masing-masing stakeholder, sumber daya yang dibutuhkan, dan indikator keberhasilan program. Tujuan utama kebijakan posyandu adalah meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan posyandu, serta meningkatkan kesehatan ibu dan anak di Indonesia.

Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi kebijakan penyelenggaraan posyandu untuk memastikan keberlanjutannya dan meningkatkan efektivitasnya dalam mencapai tujuan kesehatan. Evaluasi kebijakan penyelenggaraan Posyandu memiliki beberapa tujuan utama. Pertama, evaluasi ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas program posyandu dalam mencapai target kesehatan, seperti peningkatan cakupan imunisasi, penurunan angka kematian ibu dan bayi, peningkatan serta penyuluhan gizi balita, kesehatan lansia, bina keluarga balita, keluarga berencana, pos paud, pengendalian penyakit, perilaku hidup bersih dan sehat dan lain sebagainya. Evaluasi ini akan membantu mengidentifikasi apakah kebijakan yang telah diimplementasikan telah berhasil mencapai tujuan yang diharapkan.

Kedua, evaluasi ini juga bertujuan untuk menilai efisiensi penyelenggaraan Posyandu. Hal ini meliputi analisis terhadap penggunaan sumber daya yang ada, seperti tenaga kerja, dan anggaran yang dialokasikan. Dengan mengevaluasi efisiensi, dapat diidentifikasi kendala dan tantangan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan kebijakan Posyandu.

Seperti posyandu di desa Lawang Agung Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan yang berdiri pada tanggal 17 Maret 1988. Hingga saat ini terus melakukan peningkatan pelayanan yang berfungsi memberikan pelayanan kesehatan dasar secara gratis kepada masyarakat di tingkat desa. Dengan harapan agar masyarakat semakin menyadari betapa pentingnya kesehatan dasar. Hasil pengamatan penulis dilapangan menunjukkan bahwa penyelenggaraan kebijakan posyandu di desa Lawang Agung masih harus

dievaluasi terutama pada peningkatan kualitas pelayanan terutama dalam sosialisasi ke masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa kebijakan penyelenggaraan posyandu di desa Lawang Agung Kabupaten Bengkulu Selatan dalam melakukan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan gratis program posyandu masih harus dilakukan evaluasi untuk melihat tingkat keberhasilan dan kegagalan dari kebijakan yang sudah diimplementasikan sebelumnya.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian yang disajikan secara deskriptif kualitatif dengan indikator menurut Wayne Parsons (2008:549-552). Fokus penelitian merupakan pokok permasalahan apa yang menjadi pusat perhatian dan sesuatu yang kurang atau tanpa masalah baik masalah-masalah yang bersumber dari pengamatan peneliti Moleong (2006:92). Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti ialah observasi, wawancara, dokumentasi. Teknik analisa data dalam penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusions drawing/verification*).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Evaluasi Formatif

Evaluasi formatif merupakan evaluasi yang dilakukan pada saat kegiatan atau program sedang berlangsung. Tujuan dari evaluasi formatif adalah untuk mengidentifikasi bagian yang perlu ditingkatkan dan membuat perubahan/memberi masukan yang diperlukan untuk memastikan bahwa program atau layanan memenuhi tujuan dan sasaran yang diinginkan. Evaluasi formatif biasanya dilakukan pada saat program sedang berlangsung dan sering digunakan untuk memandu pengambilan keputusan dan meningkatkan kualitas diakhir.

1. Sejauh Mana Program Mencapai Target Populasi Yang Tepat

Dari hasil penelitian lapangan didapat hasil bahwa pengintegrasian layanan program posyandu sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar Di Pos Pelayanan Terpadu sudah dilaksanakan hanya saja ada yang berjalan secara efektif dan ada yang tidak. Dalam mencapai target populasi yang tepat ada yang sudah mencapai target dan ada yang belum. Yang mana dapat kita lihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1 Pengintegrasian Program Layanan Posyandu Di Desa Lawang Agung Kabupaten Bengkulu Selatan

No	Nama	Sasaran	Stakeholder	Keterangan
1.	Pembinaan gizi dan	Ibu, bayi, dan	Keluarga,	Terlaksana

	kesehatan ibu dan anak	balita	tenaga kesehatan, kader	secara efektif
2.	Pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan	Keluarga dan masyarakat	Tenaga kesehatan dan tim gizi	Terlaksana secara efektif
3.	Perilaku hidup sehat dan bersih	Keluarga dan masyarakat	Tenaga kesehatan dan kader	Terlaksana secara efektif
4.	Kesehatan lanjut usia	Lansia 45 tahun-70 tahun	Tenaga kesehatan	Terlaksana secara efektif
5.	Bina keluarga balita	Anak usia 0-5 tahun dan ibu hamil	Kader	Terlaksana secara efektif
6.	Pos PAUD	Anak 0-6 tahun	Kader pos paud	Terlaksana (tidak efektif)
7.	Percepatan penganeekaragaman pangan	Ibu dan keluarga	Penyuluh, kader pangan, dan tim pangan	Terlaksana secara efektif
8.	Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial	Tujuan umum kepada seluruh keluarga, tujuan khusus Keluarga bermasalah psikologis	Tokoh adat, masyarakat, dan psikologis	Terlaksana secara efektif
9.	Kesehatan produksi remaja	Remaja usia 12 tahun-21 tahun	Kader	Terlaksana secara efektif
10.	Peningkatan ekonomi keluarga	Keluarga	Kader	Terlaksana secara efektif

Sumber: Olahan Peneliti Tahun 2024

2. Penyampaian Pelayanan Konsisten Dengan Spesifikasi Desain Program

Dari hasil penelitian dilapangan didapat hasil bahwa pelayanan posyandu sudah disampaikan secara konsisten setiap pelaksanaan program sesuai dengan prosedurnya, yaitu dengan sistem 5 meja baik itu posyandu lansia dan balita mengikuti ketentuan dari (DEPKES RI, 2006).

3. Sumber Daya Yang Dibutuhkan Dalam Pelaksanaan Program

Sumber daya yang dibutuhkan ialah sumber daya manusia/petugas, sumber daya pangan, sumber daya sarana dan prasarana, dan sumber daya keuangan. Pada sumber daya manusia/petugas pelaksanaan memiliki standar khusus yang harus dipenuhi. Pada petugas puskesmas mereka harus memiliki tanda bukti/ijazah bahwa telah menyelesaikan pendidikan pada bidang ilmu kesehatan dengan profesi, dokter, bidan, perawat kesehatan masyarakat, dan gizi. Sedangkan untuk kader tidak ada semua kebijakan kader ditetapkan oleh pemerintahan desa. Namun semua petugas wajib mengikuti pelatihan posyandu terlebih dahulu guna untuk menghindari kesalahan dan kelalaian pada saat terjun dilapangan.

Sumber daya pangan yang dibutuhkan untuk makanan tambahan bagi lansia maupun bayi, balita dan ibu hamil merupakan tanggung jawab sepenuhnya oleh desa. Yang mana dalam pemberian ini tak luput dari pengawasan tim puskesmas karena merekalah yang mengetahui gizi seimbang yang dibutuhkan. Anggaran dana dari sumber daya makanan yang dibutuhkan diambil dari 10% dana kesehatan bagi masyarakat anggaran dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Dana Desa (ADD). Dana inilah yang digunakan untuk membantu memberikan makanan tambahan bagi masyarakat.

Sumber daya sarana dan prasarana yang dibutuhkan juga menjadi penunjang paling penting dalam pelaksanaan yang mana peralatan yang dibutuhkan karena menjadi tempat pelaksanaan posyandu dan posbindu berlangsung. Kebutuhan sumber daya pada sarana dan prasarana dalam pelaksanaan posyandu menjadi komponen yang paling penting. kebutuhan akan sarana dan prasarana tersebut semuanya sudah tercukupi dan tersedia di posyandu di desa Lawang Agung. Hal ini membuktikan kelayakan dari posyandu balita dan posbindu lansia untuk digunakan atau dapat terlaksana tanpa kendala.

B. Evaluasi Sumatif

Evaluasi sumatif merupakan evaluasi yang dilakukan ketika program sudah selesai atau berakhir untuk menentukan efektivitas dan keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Evaluasi sumatif biasanya dilakukan dengan menggunakan kriteria yang telah ditentukan dan melibatkan pengumpulan data melalui survei, tes, atau metode lain untuk mengukur hasil program. Tujuan dari evaluasi sumatif adalah untuk memberikan umpan balik mengenai efektivitas keseluruhan program atau layanan dan untuk menginformasikan keputusan tentang perbaikan kedepannya. Maka evaluasi ini dilakukan pada tahap objek lingkungan saja.

1. Pembandingan sebelum dan sesudah program diimplementasikan.

Dari hasil penelitian dilapangan didapat hasil bahwa perbandingan kesehatan masyarakat sebelum dan sesudah program diimplementasikan dapat dilihat dari ada atau tidaknya AKI dan AKB di desa tersebut. Dalam catatan

kader posyandu di desa Lawang Agung selama 5 tahun terakhir tidak ditemukannya AKB ataupun AKI yang artinya program yang sudah diimplementasikan di desa lawang agung dapat dikatakan berhasil. Yang mana dapat kita lihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2 Pembanding Kesehatan Masyarakat

No	Jenis	Data Pertahun		
		2021	2022	2023
1	Angka Kematian Bayi	0	0	0
2	Angka Kematian Ibu	0	0	0
3	Keluarga Berencana	5	5	4
4	Pasangan Usia Subur	135	150	168
5	Penanggulangan Diare	0	0	0
6	Gizi Buruk	0	1	1
7	Stunting	0	1	1
8	Penyakit Menular	0	0	0
9	Imunisasi 0-5 Tahun	78	85	90

Sumber: Data Kader KPM, Kader Posyandu dan Bidan Desa Tahun 2024

1. Dampak Intervensi Terhadap Satu Kelompok Dengan Kelompok Lain Atau Antara Satu Kelompok Yang Menjadi Subjek Intervensi Dan Kelompok Lain Yang Tidak (Kelompok Kontrol)

Dari hasil penelitian didapat hasil bahwa tidak ada kelompok dalam posyandu yang menjadi prioritas utama yang ada hanya populasi yang diutamakan, gunanya untuk mencegah AKB dan AKI serta menjaga indeks pertumbuhan manusia. Intervensi dalam kelompok posyandu yang dimaksud merupakan kerja sama yang terjadi anatara dinas kesehatan, puskesmas dan pemerintahan desa dalam menangani pencegahan AKB dan AKI ataupun kegiatan yang lain nya serta tanggung jawab yang diemban dalam bagian kebijakan ini.

2. Membandingkan yang terjadi dengan yang mungkin tidak terjadi tanpa intervensi

Dari hasil penelitian dilapangan didapat hasil bahwa kerja sama yang dilakukan bersama dengan bantuan pemerintahan desa tidak ada masalah sebab semua permasalahan segera diatasi secara bersama. Dan sejauh ini tidak ditemukannya msalah yang begitu besar atau yang berakibat fatal maupun merugikan.

3. Membandingkan bagian-bagian yang berbeda dalam satu wilayah mengalami dampak yang berbeda-beda akibat dari kebijakan yang sama

Dari hasil penelitian dilapangan didapat hasil bahwa pembagian wilayah di desa Lawang Agung merupakan keputusan yang tepat, pembagian wilayah ini di dasari oleh jumlah penduduk dan luas wilayah. Dengan kebijakan

pembagian wilayah ini banyak manfaat yang dirasakan masyarakat, misalnya informasi yang di terima tersampaikan dengan mudah. Penempatan kader dalam pembagian wilayah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3 Penempatan Kader Dalam Pembagian Wilayah Di Desa Lawang Agung

No	Nama	Jabatan	Penempatan
1	Nurliana	Ketua Kader	Kadun II
2	Tri Purnama, S.Pd	Sekretaris	Kadun II
3	Desi Anggraini	Bendahara	Kadun II
4	Linda Ismala Dewi	Anggota	Kadun II
5	Yunastianah	Anggota	Kadun I
6	Niharti	Ketua Kader	Kadun III
7	Eli Herlina	Sekretaris	Kadun I
8	Sartini	Bendahara	Kadun II
9	Irma	Anggota	Kadun III
10	Iputri	Anggota	Kadun I

Sumber: Olahan Peneliti Tahun 2024

Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian tentang hasil Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Posyandu Di Desa Lawang Agung Kabupaten Bengkulu Selatan dapat ditarik kesimpulan bahwa Evaluasi Kebijakan Penyelenggaraan Di Desa Lawang Agung pada program posyandu sudah terlaksana hanya saja ada yang berjalan secara efektif dan ada yang tidak, hal ini didasari karena kurangnya kesadaran dari petugas dalam melakukan sosialisasi maupun masyarakat yang mengikuti. Pelaksanaan posyandu pun sudah dilaksanakan secara efektif begitu pun dengan pelayanan yang dilakukan sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

Saran

1. Dalam sumber daya pendidikan kader posyandu hendaknya ditentukan standar pendidikannya, guna memperbaiki pelayanan yang diberikan.
2. Tingkatkan lagi pelayanan pada program pelaksanaan posyandu terutama pada sosialisasi ke masyarakat.

Daftar Pustaka

Adriani, M & Wirjatmadi B. 2012. *Pengantar Gizi Masyarakat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Edi Suharto. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Kementrian Kesehatan RI 2011. *Pedoman Umum Pengelolaan Posyandu*. Jakarta:Kemenkes RI
- Melina, Waryana (2016). Kajian Tingkat Pengetahuan Dan Sikap Kader Posyandu Tentang Pertumbuhan Dan Perkembangan Balita Di Desa Sumbersari Kecamatan Moyudan Sleman. Diakses 02 Februari 2024 Skripsi Thesis. Dari Poltekkes Kemenkes Yogyakarta.
- <http://eprints.poltekkesjogja.ac.id/946/5/5.%20Chapter2.pdf>.
- Mubarak. 2009. *Ilmu Kesehatan Masyarakat Konsep dan Aplikasi dalam Kebidanan*. Jakarta:Salemba Medika.
- Parson, W. 2017. *Policy Public: Pengantar Teori dan praktik analisis kebijakan*. Jakarta: Kencana.
- Parsons, Wayne. 2008. *Pengantar Teori Dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar Di Pos Pelayanan Terpadu.
- Samodra Wibawa , 2011. *Evaluasi kebijakan publik*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Subarsono, 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep. Teori Dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sujaryanto (2014). Analisis Peran Pemerintah Dalam Mengembangkan Candi Muaratakus Sebagai Objek Pariwisata Di Kabupaten Kampar. Diakses Pada 14 Desember 2023 Skripsi Thesis, Dari Universitas Islam Negeri Riau Sultan Syarif Kasim Riau.
- <https://repository.uin-suska.ac.id/4186/3/9.%20BAB%20II.pdf>.
- William N. Dunn, 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Edisi Kedua, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.